



## **Pendahuluan**

Fenomena peningkatan volume sampah telah bertransformasi menjadi salah satu tantangan lingkungan paling krusial yang dihadapi oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Pohuwato. Ledakan jumlah penduduk yang bergerak linear dengan perubahan gaya hidup masyarakat modern telah memicu pergeseran pola konsumsi yang masif, di mana penggunaan material sekali pakai dan kemasan plastik menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian. Akibatnya, timbulan sampah yang dihasilkan setiap harinya terus merangkak naik, melampaui kapasitas pengelolaan yang ada dan menciptakan tekanan luar biasa terhadap daya dukung lingkungan setempat.

Kondisi ini semakin diperparah oleh keterbatasan jangkauan layanan kebersihan dan masih rendahnya kesadaran kolektif mengenai pentingnya pemilahan sampah sejak dari tingkat rumah tangga. Sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai residu yang tidak bernilai dan harus segera disingkirkan dari pandangan, tanpa memikirkan dampak jangka panjang yang ditimbulkan. Pola pikir "kumpul-angkut-buang" yang masih

mendominasi ini menyebabkan beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi sangat berat, sementara proses penguraian alami sampah di alam membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan hingga ratusan tahun untuk material tertentu.

Dampak dari manajemen sampah yang kurang terencana ini bukan sekadar persoalan estetika lingkungan yang terganggu oleh pemandangan kumuh. Lebih jauh lagi, penumpukan sampah yang tidak terkelola berpotensi besar memicu pencemaran serius pada ekosistem tanah dan sumber air tanah melalui air lindi yang beracun. Selain itu, pembusukan sampah organik yang tidak teratur menghasilkan gas metana yang berkontribusi pada pemanasan global, serta menjadi sarang vektor penyakit yang dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat secara signifikan.

Di tengah urgensi tersebut, muncul sebuah pendekatan transformatif yang dikenal dengan model Bank Sampah sebagai pilar utama dalam sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Bank Sampah bukan sekadar tempat penampungan, melainkan sebuah instrumen rekayasa sosial yang dirancang untuk mengubah paradigma masyarakat terhadap limbah.

Melalui pendekatan ini, sampah tidak lagi dipandang sebagai masalah, melainkan sebagai sumber daya atau aset ekonomi yang memiliki nilai manfaat jika dikelola dengan prinsip pemilahan yang tepat sejak dari sumbernya.

Mekanisme operasional Bank Sampah mengadopsi sistem perbankan konvensional namun dengan komoditas yang berbeda, di mana masyarakat berperan sebagai nasabah yang menyetorkan sampah kering yang telah dipilah. Setiap sampah yang masuk akan melalui proses penimbangan, pencatatan dalam buku tabungan, dan dikonversi menjadi nilai rupiah sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Insentif ekonomi ini menjadi stimulan yang efektif bagi masyarakat untuk mulai memisahkan sampah organik dan anorganik, sehingga tercipta sebuah ekosistem pengelolaan yang partisipatif dan saling menguntungkan.

Setelah melalui tahap administrasi dan pencatatan, sampah-sampah yang telah terkumpul di unit bank sampah akan diklasifikasikan kembali berdasarkan jenis dan kualitasnya. Sampah bernilai ekonomis tinggi seperti plastik, kertas, logam, dan kaca kemudian disimpan secara teratur untuk dijual kembali ke pengepul besar

atau dikirim ke pabrik daur ulang. Dalam beberapa inovasi di lapangan, sampah-sampah tersebut bahkan diolah menjadi produk kerajinan tangan kreatif atau produk daur ulang lainnya, yang secara langsung memberikan nilai tambah dan memperpanjang rantai nilai (value chain) dari material bekas tersebut.

Tujuan akhir dari gerakan Bank Sampah ini adalah reduksi volume sampah yang menuju ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) secara drastis melalui penerapan prinsip Reduce, Reuse, dan Recycle (3R). Dengan memotong alur distribusi sampah anorganik langsung dari sumbernya, beban operasional pemerintah dalam pengangkutan dan pengelolaan sampah di TPA dapat ditekan secara signifikan. Hal ini menciptakan siklus ekonomi sirkular yang sehat, di mana material yang masih layak guna kembali masuk ke dalam proses produksi, sementara lingkungan tetap terjaga dari timbunan limbah yang merusak.

Di wilayah Kabupaten Pohuwato, Dinas Lingkungan Hidup telah mengambil langkah proaktif dengan menginisiasi pembentukan unit-unit bank sampah di berbagai wilayah strategis. Hingga saat ini, tercatat telah terbentuk 11 unit bank sampah yang

tersebar di beberapa kecamatan, sebagai bukti komitmen pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Upaya ini merupakan bagian dari peta jalan besar pemerintah untuk menjadikan Pohuwato sebagai daerah yang bersih, sehat, dan memiliki manajemen limbah yang mandiri.

Secara lebih spesifik, Kecamatan Buntulia menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan perhatian khusus dengan keberadaan 3 unit bank sampah yang aktif beroperasi. Sebagai salah satu pusat aktivitas masyarakat di Pohuwato, Buntulia memiliki karakteristik timbulan sampah yang cukup kompleks, sehingga keberadaan bank sampah di kecamatan ini diharapkan mampu menjadi pilot project bagi wilayah lain. Dinamika sosial dan ekonomi di Buntulia memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana sebuah program lingkungan berinteraksi dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat pedesaan dan semi-perkotaan.

Namun, dalam perjalanan implementasinya, program Bank Sampah di Kabupaten Pohuwato, khususnya di Kecamatan Buntulia, masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu kendala utama

adalah tingkat partisipasi masyarakat yang belum merata di seluruh lapisan sosial; masih banyak warga yang belum tergerak untuk menjadi nasabah aktif bank sampah karena menganggap proses pemilahan sampah terlalu merepotkan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku (behavioral change) merupakan proses jangka panjang yang memerlukan strategi edukasi yang lebih intensif.

Selain faktor kesadaran individu, aspek sosialisasi dari pihak terkait juga dinilai masih perlu ditingkatkan intensitas dan jangkauannya. Informasi mengenai tata cara pemilahan, manfaat ekonomi, hingga lokasi operasional bank sampah seringkali belum tersampaikan secara merata hingga ke tingkat rukun tetangga. Keterbatasan frekuensi pertemuan tatap muka dan media informasi membuat pesan-pesan pelestarian lingkungan melalui bank sampah terkadang terhenti pada level perangkat desa saja, tanpa menyentuh akar rumput secara mendalam.

Kendala teknis dan logistik juga menjadi hambatan nyata yang dirasakan di lapangan, terutama terkait keterbatasan armada pengangkut sampah. Jumlah truk atau kendaraan pengangkut yang terbatas seringkali menyebabkan jadwal layanan

penjemputan sampah dari unit bank sampah ke pengepul pusat menjadi tidak rutin atau terlambat. Ketidakteraturan layanan ini pada gilirannya dapat menurunkan semangat nasabah dan pengelola bank sampah unit, karena tumpukan sampah yang terlalu lama di lokasi unit dapat menimbulkan masalah baru seperti bau tidak sedap atau keterbatasan ruang simpan.

Melihat berbagai dinamika tersebut, penelitian ini difokuskan untuk membedah secara mendalam bagaimana implementasi pengelolaan sampah melalui program Bank Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato, dengan lokus penelitian di Kecamatan Buntulia. Fokus utama kajian ini adalah untuk memetakan sejauh mana program yang telah dirancang secara konseptual mampu diterjemahkan ke dalam tindakan nyata di lapangan, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat utama dalam pencapaian target-target lingkungan yang telah ditetapkan.

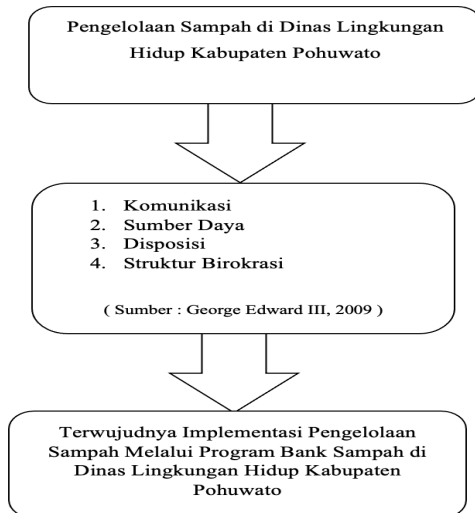
Untuk melakukan analisis yang tajam dan sistematis terhadap fenomena implementasi ini, penelitian menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III.

Kerangka kerja ini dianggap sangat relevan karena menawarkan perspektif yang holistik dengan menekankan pada empat variabel kunci yang saling berinteraksi: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Melalui kacamata teori ini, keberhasilan program bank sampah tidak hanya dilihat dari hasil fisiknya saja, tetapi juga dari proses manajerial dan perilaku para pelaksananya.

Variabel komunikasi akan mengevaluasi kejelasan dan konsistensi penyampaian informasi, sementara variabel sumber daya akan meninjau ketersediaan staf yang kompeten, pendanaan, serta sarana prasarana pendukung. Selanjutnya, variabel disposisi akan memotret sikap, komitmen, dan kejujuran para pelaksana dalam menjalankan tugasnya, sedangkan struktur birokrasi akan menganalisis Standar Operasional Prosedur (SOP) dan koordinasi antar unit kerja. Dengan membedah keempat variabel ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis bagi Pemerintah Kabupaten Pohuwato agar program Bank Sampah dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan di masa depan.



Gambar 1. Teknik Pengelolaan Persampahan



Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian (Model Implementasi Kebijakan Edward III)

**Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam pelaksanaan program Bank Sampah di Kabupaten Pohuwato, khususnya di Kecamatan Buntulia. Lokasi penelitian

berada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato dan unit Bank Sampah di Kecamatan Buntulia, dengan waktu penelitian selama tiga bulan.

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih pihak-pihak yang memahami dan terlibat langsung dalam pelaksanaan program. Informan terdiri dari Kepala DLH, Kepala Bidang pengelola Bank Sampah, petugas Bank Sampah, tenaga kesehatan, dan masyarakat (total 11 orang).

Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan Model Interaktif Miles dan Huberman (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan), dengan upaya menjaga validitas melalui triangulasi sumber.

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	1 orang
2	Kabid pengelola bank sampah	1 orang
3	Petugas Bank Sampah	2 orang

4	Tenaga Kesehatan	1 orang
5	Masyarakat	6 orang
	Total	11 orang

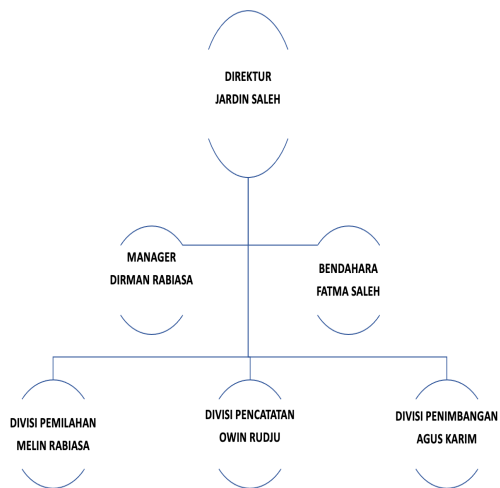
**Hasil dan Pembahasan**

Implementasi program Bank Sampah di Kecamatan Buntulia berada dalam koordinasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pohuwato dengan dukungan pemerintah kecamatan dan desa. Struktur pelaksanaan bersifat berjenjang (dinas-kecamatan-desa) dan melibatkan perangkat desa untuk penguatan otoritas serta mobilisasi partisipasi warga.

Di Kecamatan Buntulia, terdapat tiga bank sampah dengan karakter lokasi dan waktu peresmian yang berbeda: (1) Bank Sampah Mopio (awal 2017) yang saat ini berada di Desa Buntulia Utara, kompleks P3A Kecamatan Buntulia; (2) Bank Sampah Maju Bersama (2022) di Desa Buntulia pada kompleks komunal; dan (3) Bank Sampah Pelangi (2025) di Desa Buntulia Tengah pada kompleks Sekolah Al-Izzah. Sebaran ini memperlihatkan upaya memperluas akses layanan sekaligus membuka ruang edukasi lingkungan, termasuk melalui basis sekolah.

Dinamika kepemimpinan dan koordinasi program terlihat dari mekanisme komunikasi dan evaluasi yang rutin, antara lain sosialisasi tatap muka, keterlibatan DLH pada kegiatan kecamatan, serta koordinasi teknis melalui grup WhatsApp dan rapat evaluasi.

Keterlibatan tenaga kesehatan memperkuat aspek edukasi kesehatan lingkungan, terutama terkait dampak sampah rumah tangga.



Gambar 3. Struktur Petugas Bank Sampah Mopio dan Bank Sampah Maju Bersama

**Analisis Kinerja dalam Situasi Krisis (Crisis Management Performance)**

Dalam konteks penelitian ini, “situasi krisis” dipahami sebagai tekanan berkelanjutan akibat peningkatan timbulan sampah dan risiko dampak lingkungan-kesehatan, di saat partisipasi

pemilahan dan dukungan layanan belum sepenuhnya stabil. Kinerja implementasi Bank Sampah dapat dibaca melalui empat variabel Edward III sebagai ukuran kapasitas pelaksana dalam merespons tekanan tersebut.

Pada aspek komunikasi, DLH dan petugas Bank Sampah melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat, termasuk melalui forum kecamatan dan koordinasi lintas pihak. Meski demikian, temuan lapangan menunjukkan masih ada warga yang belum memahami nilai/manfaat sampah dan mekanisme bank sampah, sehingga intensitas dan variasi strategi komunikasi perlu diperkuat agar jangkauan partisipasi semakin luas.

Pada aspek sumber daya, program didukung sarana utama seperti kendaraan angkut (viar), timbangan, tempat penyimpanan, dan buku tabungan nasabah. Dari sisi SDM, petugas di bank sampah dinilai cukup untuk membagi tugas penjemputan, penimbangan, pencatatan, hingga administrasi.

Dukungan operasional membantu menjaga layanan berjalan, namun kebutuhan penguatan layanan rutin tetap muncul seiring keterbatasan armada dan

kebutuhan penjadwalan yang lebih teratur.

Pada aspek disposisi, pelaksana menunjukkan komitmen pelayanan (profesional, ramah, responsif) yang penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Keterbatasan utama lebih banyak berasal dari sebagian masyarakat yang belum memiliki kesadaran, sehingga pelaksana perlu pendekatan persuasif yang konsisten untuk mendorong perubahan perilaku.

Pada aspek struktur birokrasi, implementasi didukung struktur organisasi yang jelas dan SOP internal yang mengatur alur kerja mulai dari penerimaan sampah, penimbangan, pencatatan, penyimpanan, pemilahan hingga penjualan ke pengepul. Struktur yang berjenjang memudahkan koordinasi, sementara SOP membuat proses lebih tertib dan transparan bagi nasabah.

### **Resiliensi Birokrasi di Tengah "Twin Shocks"**

Resiliensi birokrasi pada program Bank Sampah tampak pada kemampuan menjaga layanan tetap berjalan meskipun menghadapi "twin shocks" berupa (1) peningkatan timbulan sampah/tekanan lingkungan dan (2)

fluktuasi partisipasi masyarakat akibat keterbatasan pengetahuan, motivasi, serta konsistensi sosialisasi. Dalam situasi ini, ketahanan program ditentukan oleh kemampuan pelaksana mempertahankan ritme layanan sekaligus menyesuaikan strategi pendekatan ke warga.

Temuan menunjukkan bahwa keberadaan SOP, struktur koordinasi dinas-kecamatan-desa, serta dukungan sarana dasar menjadi modal penting untuk mempertahankan keberlangsungan layanan. Keterlibatan tenaga kesehatan juga memperkuat dimensi edukasi, yang menjadi faktor kunci untuk mengubah perilaku pemilahan dari sumber.

Agar resiliensi program meningkat, beberapa langkah penguatan dapat dilakukan: (a) sosialisasi lebih rutin dan variatif (melibatkan sekolah, PKK, tokoh masyarakat) untuk memperluas basis nasabah; (b) penjadwalan layanan yang lebih teratur dan transparan; (c) penguatan kemitraan dengan pengepul/UMKM daur ulang untuk memperlancar hilirisasi; serta (d) evaluasi berkala lintas sektor untuk memastikan kualitas layanan, ketersediaan sarana, dan kesinambungan pembiayaan operasional.

## **Kesimpulan dan Rekomendasi**

Secara keseluruhan, implementasi program Bank Sampah di Kabupaten Pohuwato, khususnya di Kecamatan Buntulia, telah menunjukkan kerangka operasional yang cukup progresif namun masih memerlukan penguatan sistemik di berbagai lini. Berdasarkan perspektif teori George C. Edward III, aspek komunikasi dan struktur birokrasi telah terbentuk melalui regulasi daerah dan pembentukan unit-unit kerja, namun sinkronisasi antara kebijakan di tingkat Dinas Lingkungan Hidup dengan realitas operasional di tingkat unit seringkali mengalami hambatan teknis. Keberadaan 11 unit bank sampah merupakan capaian awal yang signifikan sebagai fondasi awal, namun efektivitasnya belum mencapai titik optimal karena alur koordinasi dan standar operasional prosedur (SOP) layanan belum sepenuhnya dijalankan secara konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan.

Kendala utama yang menghambat akselerasi program ini terletak pada keterbatasan sumber daya, baik dari segi infrastruktur pendukung maupun armada pengangkut yang menjadi urat nadi distribusi sampah terpilah. Ketidakteraturan jadwal penjemputan

sampah dari unit-unit di Kecamatan Buntulia menuju pusat pengepulan menciptakan hambatan logistik yang berdampak langsung pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap rutinitas layanan. Selain itu, keterbatasan anggaran operasional untuk pemeliharaan fasilitas dan kurangnya tenaga lapangan yang terampil membuat unit bank sampah harus beroperasi dengan kapasitas minimal, yang pada akhirnya membatasi volume penyerapan sampah dari nasabah secara lebih masif dan berdampak pada penumpukan residu yang tidak terkelola.

Dari sisi disposisi dan partisipasi publik, terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara semangat para pengelola unit dengan respon masyarakat yang masih bersifat fluktuatif dan situasional. Meskipun para pelaksana di lapangan memiliki sikap yang positif dan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan, tantangan dalam mengubah pola pikir masyarakat dari kebiasaan "membuang" menjadi budaya "memilah" tetap menjadi batu sandungan utama yang sulit ditembus. Kesadaran kolektif yang belum merata mengakibatkan partisipasi nasabah cenderung stagnan pada kelompok tertentu saja, sehingga potensi ekonomi sirkular yang

diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan warga melalui tabungan sampah belum dapat dirasakan manfaatnya secara inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai langkah perbaikan, direkomendasikan agar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato melakukan rekayasa ulang terhadap strategi komunikasi melalui pola sosialisasi yang lebih transformatif dan menyentuh akar rumput. Pendekatan tidak boleh lagi hanya bersifat administratif atau seremonial, melainkan harus melibatkan kolaborasi lintas sektoral dengan menggandeng tokoh masyarakat, penggerak PKK, dan institusi pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai pengelolaan sampah sejak usia dini. Penguatan kampanye digital yang informatif mengenai nilai ekonomi sampah serta pemberian apresiasi atau *reward* bagi nasabah aktif dapat menjadi stimulan efektif untuk meningkatkan keterlibatan publik secara sukarela, sekaligus memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap keberlanjutan program ini.

Secara struktural dan kebijakan, pemerintah daerah perlu memprioritaskan alokasi anggaran untuk





Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 18 Tahun 2008 tentang  
Pengelolaan Sampah. (2008).